

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN RISK MANAGEMENT COMMITTEE PADA BANK UMUM KONVENSIONAL DI INDONESIA

TYA MELINDA

20152112034

STIE INDONESIA BANKING SCHOOL

tyamelinda@gmail.com

ABSTRAK

Krisis perbankan dan ekonomi 2008 di Amerika Serikat telah memicu Bank Indonesia (BI) untuk meningkatkan penggunaan manajemen risiko bagi perbankan dewasa ini. Pembuatan Komite Manajemen Risiko pada bank telah diatur dan dipantau secara ketat oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tindakan ini dilakukan sesuai dengan pernyataan Basel II dan prinsip Good Corporate Governance mengenai pentingnya manajemen risiko pada perbankan dan aktivitas perbankan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan Komite Manajemen Risiko dan hubungannya dengan faktor penentu, seperti: komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan ukuran perusahaan, di banyak bank di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bank-bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2016. Purposive sampling digunakan untuk mengumpulkan data dan menghasilkan 190 data bank sebagai sampel akhir.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan keberadaan Komite Manajemen Risiko. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah Komisaris Independen memiliki hubungan positif dan signifikan dengan adanya Komite Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam analisis regresi berganda dengan angka probabilitas 0,0000 secara signifikan.

Kata Kunci : Komite Manajemen Risiko, Komisaris Independen, Ukuran Dewan dan Ukuran Perusahaan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis keuangan global yang terjadi karena kegagalan pembayaran kredit perumahan pada tahun 2008 di Amerika Serikat telah menimbulkan banyak kesulitan dalam dunia bisnis. Peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, lembaga keuangan terbesar di dunia seperti *Lehman Brothers*, *Merrill Lynch* dan *AIG* terpuruk dan diselamatkan oleh pemerintah Amerika Serikat selama krisis keuangan global 2007-2008. Krisis tersebut mengindikasikan bahwa pentingnya penerapan manajemen risiko dalam perusahaan seperti screening dan monitoring terhadap kredit-kredit berisiko guna meminimalisir dampak negatif dari *adverse selection* dan *moral hazard* dari kreditor, serta penerapan spesialisasi manajemen risiko dalam bentuk pinjaman sebagai salah satu upaya menyeleksi kelayakan suatu perusahaan atau perorangan pada saat mengajukan pinjaman. Kegagalan lembaga-lembaga mengakibatkan pembekuan kredit pasar global dan intervensi pemerintah diperlukan di seluruh dunia. Kejadian tersebut telah menarik perhatian investor dan regulator, tanpa memperhatikan penyebab kejadian tersebut karena pengambilan risiko yang berlebihan (*excessive risk taking*) dalam jangka pendek atau peningkatan level risiko pada perusahaan, sebagai penyebab timbulnya krisis (Tao dan Hutchinson, 2011).

Peristiwa yang menimpa banyak lembaga keuangan besar merupakan salah satu faktor runtuhnya perusahaan di dunia karena tidak memiliki corporate governance yang baik serta adanya

kelemahan terhadap pengungkapan manajemen risiko perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan diharapkan dapat menyajikan informasi secara lebih transparan termasuk pengungkapan manajemen risiko perusahaan karena laporan keuangan digunakan oleh para pengguna untuk kepentingan investasi maupun untuk mengetahui kondisi perusahaan. Adanya risiko dalam setiap kegiatan usaha, perusahaan dituntut untuk mampu mengendalikan dan memberikan solusi terkait pengelolaan risiko.

Perkembangan situasi perbankan yang makin pesat saat ini akan diikuti dengan kompleksitas risiko yang dihadapi. Dilihat dari eksposur risiko pada Bank, pengawasan dan manajemen risiko pada Bank perlu ditingkatkan lagi dan dewan komisaris memiliki peran yang penting dalam pengawasan dan manajemen risiko dalam *good corporate governance* (GCG). Menurut hasil penelitian Setyarini (2011), penerapan manajemen risiko yang baik harus memastikan bahwa organisasi tersebut mampu memberikan perlakuan yang tepat terhadap risiko yang akan mempengaruhinya. Implementasi manajemen risiko pada bank di Indonesia diarahkan sejalan dengan standar baru secara global yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS) dengan konsep permodalan baru dimana kerangka perhitungan modal lebih sensitif terhadap risiko (*risk sensitive*) serta memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas manajemen risiko di bank atau yang lebih disebut dengan Basel II (penyempurnaan dari Basel I), agar perbankan Indonesia saat ini dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dan penerapannya disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank dalam hal keuangan, infrastruktur pendukung maupun sumber daya manusia. Krisis yang terjadi pada tahun 2008 salah satunya diakibatkan oleh lemahnya pengawasan yang menjadi tanggung jawab dewan komisaris terhadap direksi perusahaan, karena tugas utama dewan komisaris adalah mengawasi pelaksanaan kebijakan dan memberikan nasihat kepada direksi.

Dalam dunia perbankan di Indonesia dewasa ini, *Risk Management Committee* (RMC) dikenal dengan nama Komite Manajemen Risiko. Komite Manajemen Risiko telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menyiapkan peraturan mengenai Penerapan Manajemen Risiko pada POJK No. 18/POJK/03/2016 yang diberlakukan pada tahun 2016. Pembentukan komite Manajemen Risiko terhadap perbankan diregulasi sangat ketat oleh Bank Indonesia, dengan mengenakan sanksi apabila tidak dilaksanakan. Selain pembentukan komite Manajemen Risiko dalam peraturan tersebut juga dibentuk satuan kerja Manajemen Risiko yang bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau kepada direktur yang ditunjuk.

Dalam pasal 16 POJK No. 18/POJK/03/2016 dijelaskan bahwa bank wajib membentuk komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif. Komite dan satuan kerja yang dimaksud diharapkan dapat membantu perbankan dalam mengelola risiko yang muncul. Pengendalian risiko dimaksudkan agar aktivitas yang dilakukan perbankan tidak menimbulkan kerugian yang melampaui kemampuan bank maupun yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.

Komite Manajemen Risiko sekurang-kurangnya terdiri atas mayoritas direksi dan pejabat eksekutif terkait sesuai dengan pasal 17 dalam POJK No. 18/POJK/03/2016. Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko meliputi penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan Manajemen Risiko, serta perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan. Komite Manajemen Risiko juga menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

Hasil dari satuan kerja Manajemen Risiko berupa laporan profil risiko yang diserahkan kepada Bank Indonesia sesuai dengan yang diserahkan kepada direktur utama dan komite Manajemen Risiko. Sistem informasi Manajemen Risiko mencakup laporan mengenai eksposur risiko, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit risiko, dan realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Selain laporan profil risiko, Bank wajib menyampaikan laporan produk dan aktivitas baru kepada Bank Indonesia. Laporan lain yang wajib diserahkan oleh Bank adalah laporan mengenai potensi munculnya kerugian yang terjadi pada Bank. Laporan-laporan yang dikirimkan oleh Bank kepada Bank Indonesia sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi (*transparencey*) dalam GCG. Hal ini dijelaskan pada POJK No. 18/POJK/03/2016 pasal 12, pasal 25 dan pasal 26.

Dalam Komite Manajemen Risiko komisaris dan direksi merupakan esensi terpenting, karena memiliki wewenang dan tanggung jawab mengenai kebijakan. Direksi menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta dewan komisaris mengevaluasi kebijakan tersebut. Komisaris

independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap *shareholder*, bukan hanya sebagai pemenuhan peraturan.

1.2 Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Penelitian ini dilakukan pada industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), pemilihan industri perbankan yang terdaftar di BEI dikarenakan fokus penulis pada industri perbankan.
- 2) Penelitian hanya pada Bank Umum yang terdaftar pada BEI dan telah menyediakan laporan tahunan lengkap periode 2012-2016.

1.3 Perumusan Masalah

Bagaimana pengaruh Dalam penelitian ini, faktor – faktor yang mempengaruhi komite manajemen risiko adalah jumlah komisaris independen, ukuran dewan dan ukuran perusahaan. Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah diuraikan sebagai berikut :

- 1) Jumlah komisaris independen terhadap keberadaan RMC?
- 2) Bagaimana pengaruh ukuran dewan terhadap keberadaan RMC?
- 3) Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap keberadaan RMC

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini diharapkan berguna antara lain :

Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui pengaruh jumlah komisaris independen terhadap komite manajemen risiko pada Bank Umum di Indonesia
- 2) Mengetahui pengaruh ukuran dewan terhadap komite manajemen risiko
- 3) Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap komite manajemen risiko

Manfaat Penelitian

- 1) Bagi pembaca, semoga informasi dalam penelitian ini dapat memberikan referensi dan pemahaman mengenai komite Manajemen Risiko yang terdapat pada Bank.
- 2) Bagi dunia ilmu pengetahuan, semoga menjadi tambahan penelitian mengenai Komite Manajemen Risiko dilingkungan perbankan di Indonesia, sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan bagi peneliti berikutnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi

Hubungan agensi merupakan hubungan antara investor (*principal*) dengan manajer (agen). Investor mendelegasikan wewenang kepada agen, untuk membuat keputusan terhadap perusahaan tersebut. Asimetri informasi merupakan situasi ketika investor tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja manajer. Investor meragukan kinerja manajer untuk memberikan kontribusi atas hasil aktual perusahaan. Sedangkan tambahan informasi yang mungkin dimiliki oleh manajer disebut dengan informasi pribadi. Perbedaan preferensi antara investor dengan manajer serta informasi pribadi manajer dapat menyebabkan manajer tersebut bias dalam menyajikan informasi kepada investor. Salah satu penyajian ini diistilahkan dengan bahaya moral, karena seorang manajer termotivasi untuk salah menyajikan informasi karena sifat sistem pengendalian (Anthony dan Govindarajan, 2009).

Akibat adanya kemungkinan informasi yang tidak seimbang (asimetris informasi) dapat terjadi dua permasalahan karena adanya kesulitan investor untuk memantau tindakan manajer. Dua permasalahan ini adalah (Scott, 2000) :

- 1) *Moral Hazard*, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar.
- 2) *Adverse Selection*, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman.

Kegagalan pemantauan membuat investor menghadapi *agency costs*, yaitu risiko ketika pemilik perusahaan akan mengambil tindakan dengan menggunakan uang dari investor yang berlawanan dengan perjanjian pada kontrak efek. Biaya pemantauan merupakan bagian dari *agency costs*. Semakin sulit untuk mengumpulkan informasi, semakin mungkin bahwa kontrak akan rusak (Saunders dan Cornett, 2011). Jensen dan Meckling dalam Siagian (2011:10) menyebutkan bahwa

ada tiga jenis biaya yang timbul karena *agency costs* yaitu :1.) Biaya Pengawasan (*monitoring costs*), 2.) Biaya Insentif Kepegawaian, 3.) Kerugian Residu (*residual loss*).

2.2 Komisaris Independen

Dalam POJK No. 55/POJK.03/2016 mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan pemegang saham dan anggota direktur dan dewan komisaris lainnya. Karena jika komisaris independen tersebut memiliki hubungan atau terafiliasi dengan direksi atau pemegang saham maka dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Menurut Muntoro (2008), adanya komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham (mayoritas) dan menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya. Dan juga jumlah komisaris independen harus sebanding dengan komisaris non independen agar pada saat pemungutan suara didapatkan hasil yang adil.

Sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 proporsi komisaris independen adalah 50% dari jumlah anggota komisaris. Perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang tinggi cenderung lebih memperhatikan risiko dan memandang pembentukan RMC sebagai tanggung jawab pengawasan (Debby Monerza, 2013).

2.3 Ukuran Dewan

Membangun dewan komisaris yang efektif dimulai dari proses rekrutmen dan orientasi. Rekrutmen anggota dewan komisaris adalah proses kunci awal yang sangat krusial dalam membangun dewan komisaris yang efektif (Muntoro, 2008). Ukuran dewan adalah jumlah pas dari anggota dewan komisaris, termasuk ketuanya, untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Ukuran yang pas ini dipengaruhi oleh berbagai hal, sebagai berikut (Muntoro, 2008): 1.) Ukuran dewan direksi, 2.) Industri dan jenis keahlian yang dibutuhkan, 3.) *Overall risk* yang dihadapi, 4.) Komite yang ada.

Menetapkan ukuran dewan komisaris harus memperhatikan ukuran dewan direksi, karena dalam proses rapat yang berlangsung dalam membahas suatu masalah strategis, diperlukan proporsi yang sama atau seimbang sehingga tidak ada kalah suara dalam penyelesaian masalah. Menurut Muntoro (2008) ada tiga karakteristik utama yang diperhatikan dalam melihat komposisi dewan komisaris, yaitu : 1.) kesenioritasan (atau kejunioran) dari anggota dewan komisaris, 2.) jenis keahlian yang dimiliki dan 3.) komisaris independen versus komisaris non-independen.

Lebih lanjut dalam penelitian Muntoro (2008), bahwa anggota senior diperlukan karena mereka dianggap sudah matang, sangat berpengalaman di bidang manajemen dan bijaksana dalam berfikir dan mengambil keputusan. Namun apabila seluruh dewan komisaris beranggotakan senior hasilnya akan kurang efektif, terutama pada lingkungan yang cepat berubah. Karena kelemahan anggota senior adalah kurang peka terhadap perubahan lingkungan. Anggota junior akan berdampak positif bagi dewan komisaris dikarenakan semangat, kreativitas, keingintahuan yang besar serta kepekaan terhadap perubahan lingkungan dan kemampuan analisis teknik yang berasal dari pemahaman mengenai alat analisis dan peralatan manajerial yang mutakhir. Tetapi kelemahan apabila seluruh dewan komisaris merupakan anggota junior akan menghasilkan perubahan yang arahnya tidak selalu jelas, karena kurangnya pengalaman.

Kemudian ukuran dan komposisi dewan komisaris membantu dalam keefektifan kerja dewan komisaris, ukuran yang tidak seimbang dengan jumlah direksi yang lebih banyak akan menyebabkan komisaris menghadapi kesulitan ketika bernegosiasi dengan dewan komisaris (Muntoro, 2008). Dalam POJK No. 55/POJK.03/2016 mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, jumlah dan komposisi komisaris paling sedikit adalah tiga orang dan paling banyak adalah sama dengan jumlah anggota direksi.

Menurut Pasal 30 POJK No. 55/POJK.03/2016 tugas dan kewajiban dewan komisaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pihak direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi. Pengawasan yang dimaksud adalah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

Untuk membantu dalam pengawasan terhadap Bank, dewan komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi. Dewan komisaris wajib membentuk tata tertib dan memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan

tugas dengan baik. Untuk mendukung operasional, maka dewan komisaris membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), SDM dan *Risk Management Committee* (RMC).

2.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan faktor penting dalam pembentukan komite. Perusahaan dengan total aset besar atau ukuran yang besar cenderung memiliki masalah agensi yang besar, karena kesulitan dalam pengawasan. Bank dengan ukuran yang besar memiliki tuntutan untuk membentuk *Risk Management Committee* untuk mengawasi berbagai risiko.

Menurut Saunders (2011), penekanan pada perdagangan efek dan penjamin emisi maka ukuran industri biasa dilihat dari modal ekuitas perusahaan – perusahaan yang berpartisipasi dalam layanan keuangan. Ekuitas atau modal investasi digunakan sebagai patokan paling umum dari ukuran relatif.

Menurut Machfoedz (2006), klasifikasi ukuran perusahaan dalam berbagai cara, antara lain : total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan terbagi dalam tiga kategori berdasarkan total asset perusahaan, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*).

2.5 Manajemen Risiko Bank

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Proses Manajemen Risiko merupakan tindakan berkesinambungan, yaitu (Ferry Idroes, 2008) :

- 1) Identifikasi dan Pemetaan Risiko,
- 2) Kuantifikasi/Menilai/Melakukan Peringkat Risiko dengan aplikasi teknik pemodelan dalam mengukur risiko,
- 3) Menegaskan Profil Risiko dan Rencana Manajemen Risiko,
- 4) Solusi Risiko/Implementasi Tindakan terhadap Risiko,
- 5) Pemantauan dan Kaji Ulang Risiko.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tentang “Penerapan Manajemen Risiko Untuk Bank Umum” merupakan wujud keseriusan Bank Indonesia dalam masalah manajemen risiko perbankan. Keseriusan tersebut lebih dipertegas dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.12/7/PBI/2010 tentang “Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus Dan Pejabat Bank Umum”, yang mengharuskan semua pejabat bank dari tingkat terendah hingga tertinggi memiliki sertifikasi manajemen risiko yang sesuai dengan tingkat jabatannya. Peraturan yang diterapkan untuk bank umum, yang meliputi (Hardanto, 2008) : 1.) Bank yang berbadan hukum PT, 2.) Bank yang dibentuk berdasarkan undang-undang pemerintah daerah (BPD), 3.) Bank yang didirikan dengan undang-undang koperasi, 4.) Cabang dari bank asing. Bank Indonesia mewajibkan struktur manajemen risiko dari semua Bank untuk mencakup risiko-risiko sebagai berikut: risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional dan risiko likuiditas.

Bank yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh jenis risiko. Bank yang tidak memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi wajib menerapkan Manajemen Risiko sekurang-kurangnya untuk empat jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Manajemen risiko diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan, memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang yang jauh lebih tinggi dengan mengambil risiko yang lebih tinggi, mengurangi kesalahan fatal, menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tingkatan dalam organisasi sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya (Ferry Idroes, 2008).

Untuk menerapkan Manajemen Risiko yang efektif diperlukan sistem informasi Manajemen Risiko yang mencakup laporan atau informasi (POJK No.38/POJK.03/2016):

- 1) Eksposur risiko
- 2) Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit
- 3) Realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang diterapkan

Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko wajib disampaikan secara rutin kepada Direksi. Penerapan manajemen risiko bagi bank umum bertujuan agar perbankan Indonesia dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dan penerapannya disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank dalam hal keuangan, infrastruktur pendukung maupun sumber daya manusia. Dengan ketentuan ini, bank diharapkan mampu melaksanakan seluruh aktivitasnya secara terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif. Bank Indonesia melalui implementasi Basel II (penyempurnaan dari Basel I) diharapkan dapat meningkatkan aspek manajemen risiko agar bank semakin resisten terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik di dalam negeri, regional maupun internasional (Bank Indonesia, 2003). Bank Indonesia juga menuntut dewan komisaris dan direksi setiap bank harus memahami rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Hal ini agar perbankan Indonesia terhindar dari risiko likuiditas yang berlebihan atau krisis pada bank yang dapat mengakibatkan sistem perekonomian dan perbankan Indonesia menjadi tidak stabil. Praktik manajemen risiko di perbankan dapat menggunakan berbagai alternatif penilaian profil risiko. Standar Basel II menggunakan beberapa alternatif pendekatan macam-macam risiko dalam menghitung kebutuhan modal yang sesuai dengan profil risiko bank (Goyal, 2010). Penerapan manajemen risiko di samping sudah menjadi suatu kebutuhan bagi dunia perbankan dalam meningkatkan kinerja usaha bank, juga sudah merupakan keharusan menurut ketentuan Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/2/DPNP/2003. Pengelolaan profil risiko dalam proses penerapan manajemen risiko di perbankan Indonesia tentu tidak mudah untuk dilakukan. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana mengelola manajemen risiko pada bank agar fungsi intermediari perbankan tetap konsisten dan terpadu. Implementasi Standar Basel II dengan lebih memfokuskan peningkatan kualitas manajemen risiko di setiap profil risiko dinilai baik bagi pengendalian risiko perbankan (Bank for International Settlement, 2005). Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, yang paling kurang mencakup 4 (empat) pilar yaitu:

- 1) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- 2) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
- 3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- 4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Disampaikan pada Pasal 13 POJK No. 18 /POJK.03/2016 bahwa Bank wajib menerapkan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank. Lebih lanjut dalam Pasal 14 POJK No. 18 /POJK.03/2016 dijelaskan bahwa pelaksanaan sistem pengendalian intern sekurang-kurangnya mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko terdapat dalam Pasal 15 POJK No. 18 /POJK.03/2016.

2.6 Risk Management Committee

Dewan komisaris bank mempunyai kewajiban umum menciptakan struktur organisasi untuk mengelola risiko bank yang meliputi komite manajemen risiko dan unit manajemen risiko. Keanggotaan komite manajemen risiko terdiri dari mayoritas dewan direksi bersama-sama dengan para pejabat senior (*executive officer*) yang terkait (Ferry Idroes, 2008: 66). Komite manajemen risiko harus mampu menyediakan rekomendasi bagi direksi utama dalam beberapa hal:

- 1) Kebijakan risiko, strategi, dan aplikasi
- 2) Setiap perubahan proses sebagai hasil rekomendasi audit internal atau evaluasi lainnya dari proses manajemen risiko
- 3) Penjelasan kepada Bank Indonesia dan dewan direksi bank beberapa keputusan yang dibuat oleh bank yang bertentangan dengan kebijakan manajemen risiko.

Penelitian yang dilakukan oleh Sabarudin Lase (2014: 20), secara umum area tugas dan wewenang komite manajemen risiko adalah :

- 1) Mempertimbangkan strategi manajemen risiko organisasi
- 2) Mengevaluasi operasi manajemen risiko organisasi

- 3) Menaksir pelaporan keuangan organisasi
- 4) Memastikan bahwa organisasi dalam prakteknya memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku Dalam POJK No.38/POJK.03/2016 ditetapkan bahwa dalam pelaksanaan manajemen risiko yang efektif , bank wajib membentuk komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko. Komite manajemen risiko terdiri dari mayoritas direksi dan pejabat eksekutif terkait. Wewenang dan tanggung jawab komite manajemen risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, yang meliputi : 1.) Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, 2.) Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, 3.) Penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

Sedangkan dalam Pasal 18 POJK No.38/POJK.03/2016, ukuran satuan kerja manajemen risiko disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank serta risiko yang melekat pada Bank. Dan satuan kerja manajemen risiko harus independen terhadap satuan kerja operasional dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern. Serta satuan kerja bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau kepada direktur yang ditugaskan secara khusus. Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko meliputi:

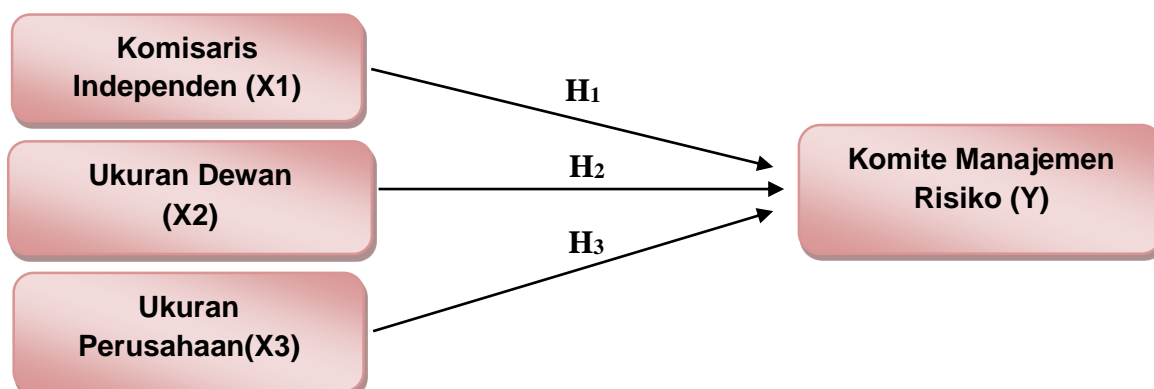
- 1) Pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh direksi
- 2) Pemantauan posisi risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional; serta melakukan *stress testing*
- 3) Kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko
- 4) Pengkajian usulan aktivitas dan atau produk baru
- 5) Evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko, bagi bank yang menggunakan model untuk keperluan intern
- 6) Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dan atau kepada komite manajemen risiko, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Dalam rangka pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis. Pada Pasal 20 POJK No.38/POJK.03/2016, kebijakan dan prosedur meliputi :

- 1) Sistem dan prosedur dan kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru
- 2) Identifikasi seluruh risiko yang terkait dengan produk dan aktivitas baru
- 3) Masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan risiko terhadap produk dan aktivitas baru
- 4) Sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru
- 5) Analisis aspek hukum untuk produk dan aktivitas baru.

2.7 Rerangka Pemikiran Penelitian

Dalam penelitian ini akan diuji faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan *Risk Management Committee* pada perbankan di Indonesia yang sudah terdaftar pada BEI. Variabel yang digunakan terdiri dari dua yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri atas tiga faktor yaitu pengaruh jumlah komisaris independen, pengaruh ukuran dewan, dan pengaruh ukuran perusahaan. Berdasarkan uraian faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan *Management Risk Committee* maka kerangka pemikiran penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



2.8 Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Jumlah Komisaris Independen terhadap RMC

Jumlah anggota independen dalam dewan komisaris dapat dikatakan sebagai indikator independensi dewan dari manajemen (Debby Monerza, 2013). Kehadiran komisaris independen dapat meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham (mayoritas) dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya (Muntoro, 2008). Perusahaan dengan komisaris independen memiliki *agency cost* yang rendah, karena dengan adanya komisaris independen lebih baik dalam mengontrol para manajer (Sabarudin Lase, 2014). Diperkirakan dengan adanya komisaris independen keberadaan komite manajemen risiko dapat berjalan dengan efisien. Dalam penelitian Sabarudin Lase, (2014) , Debby Monerza, (2013) ditemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan pada perusahaan yang listing di bursa efek.

H₁ :Semakin tinggi Jumlah Komisaris Independen maka semakin memiliki hubungan positif dengan keberadaan RMC

Pengaruh Ukuran Dewan terhadap RMC

Dalam penelitian Sabarudin Lase, (2014) menyatakan bahwa ukuran dewan berhubungan positif dengan keberadaan RMC. Hasil penelitian ini, sejalan dengan penelitian Liew et al (2012) yang menyatakan bahwa ukuran dewan berpengaruh positif terhadap RMC. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂ :Semakin tinggi Ukuran Dewan maka semakin memiliki hubungan positif dengan keberadaan RMC

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap RMC

Selain kompleksitas bank, ukuran perusahaan atau bank menentukan pembentukan komite manajemen risiko di dalam bank tersebut. Karena perusahaan yang besar berpotensi memiliki masalah agensi yang lebih besar, karena lebih sulit melakukan tindakan *monitoring* (Debby Monerza, 2013). Ukuran perusahaan yang besar dapat diartikan memiliki risiko yang besar, sehingga perusahaan tersebut mengadopsi praktek *corporate governance* dengan lebih baik. Hal ini terkait dengan tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham yang memiliki kepemilikan terhadap perusahaan tersebut. Sehingga ukuran perusahaan akan menentukan keberadaan komite manajemen risiko.

H₃ :Semakin tinggi Ukuran Perusahaan maka semakin memiliki berhubungan positif dengan keberadaan RMC

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek yang ingin diteliti adalah industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode pengamatan dilakukan pada tahun 2012 - 2016 untuk setiap laporan keuangan yang tersedia di perbankan tersebut. Subjek dalam penelitian ini adalah Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan subjek penelitian dan Objek dalam penelitian ini adalah jumlah komisaris independen di suatu Bank, ukuran dewan dan ukuran perusahaan.

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, karena memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan kemencengan distribusi (Ghozali, 2011). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberadaan *Risk Management Committee* pada perbankan di Indonesia.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dalam kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan. Kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan yang berasal dari kelompok industri perbankan yang terdaftar di BEI,
- 2) Bank yang menyediakan laporan tahunan lengkap di BEI pada tahun 2012 - 2016,

3) Bank yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan untuk periode 2012 - 2016 yang dinyatakan dalam Rupiah (Rp).

Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan perbankan pada tahun 2012 - 2016. Adapun data sekunder yang dibutuhkan dari laporan tahunan adalah keberadaan komite manajemen risiko atau RMC yang terdiri dari keberadaan proposi komisaris independen, ukuran dewan dan ukuran perusahaan. Sumber data diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id dan website resmi dari Bank yang bersangkutan.

Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis data yang diperlukan yaitu data sekunder yang di dapat dari situs resmi IDX, berupa laporan keuangan (*annual report*) dari perusahaan finansial atau Bank yang sudah terdaftar pada IDX.

3.3 Teknik Pengolahan Data

Model Penelitian

Model pada penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan menggunakan alat bantu *E-Views* versi 7, regresi linier menggambarkan seberapa besar pengaruh variable dependen mempengaruhi variabel independen. Model dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$RMC_{it} = \beta_0 + \beta_1(KI)_{it} + \beta_2(UD)_{it} + \beta_3 (UP)_{it} + e.$$

Dimana :

RMC_{it} = Keberadaan RMC atau komite manajemen risiko pada bank i periode t

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

KI = Jumlah komisaris independen pada bank i periode t

UD = Ukuran dewan pada bank i periode t

UP = Ukuran perusahaan pada bank i periode t

e = Error

Operasionalisasi Variabel

Setelah data – data yang diperlukan terkait dengan Komite Manajemen Risiko atau RMC maka data – data tersebut selanjutnya akan diolah dengan melakukan beberapa langkah, sebagai berikut:

No	VARIABEL	DEFINISI	MEASUREMENT	SKALA
Independen :				
1	Jumlah Komisaris Independen/KI (X1)	Jumlah anggota Komisaris Independen dalam suatu Bank	Jumlah anggota Komisaris Independen dalam suatu bank	Rasio
2	Ukuran Dewan/UD (X2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu Bank	Jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu bank	Rasio
3	Ukuran Perusahaan/UP (X3)	Ukuran perusahaan suatu Bank	Nilai <i>Logaritma Natural</i> dari jumlah aktiva yang dimiliki suatu Bank	Rasio
Dependen :				

No	VARIABEL	DEFINISI	MEASUREMENT	SKALA
1	Komite Manajemen Risiko atau RMC (Y)	Penerapan RMC pada Bank	Menggunakan variabel dummy, nilai 1 untuk Bank yang memiliki RMC dan 0 untuk sebaliknya	Dummy

3.4 Metode Analisis Data

Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Statistik Deskriptif

Analisa statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atas variabel-variabel yang diuji coba dalam penelitian. Gambaran yang dimaksud seperti distribusi frekuensi, nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, nilai yang sering muncul dan standar deviasi dari variable bebas lainnya.

Untuk variabel jumlah komisaris independen, ukuran dewan, dan ukuran perusahaan dapat diketahui nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, nilai yang sering muncul dan standar deviasi dari setiap variabel.

Analisis Regresi Data Panel

Gabungan antara data seksi silang (cross section) dan data runtun waktu (time series) akan membentuk data panel dan data pool (Winarno, 2011). Data panel diperkenalkan pada tahun 1950 oleh Howles, merupakan data seksi silang (terdiri atas beberapa variabel) dan juga sekaligus terdiri atas beberapa waktu, sedangkan data pool, sebenarnya juga data panel, kecuali masing-masing kelompok dipisahkan berdasarkan objeknya (Winarno, 2011).

Uji Chow

Uji Chow (*Chow Test*) adalah alat untuk menguji *test for equality of coefficients* atau uji kesamaan koefisien dan tes ini ditemukan oleh Gregory Chow (Ghozali, 2011). Uji Chow (*Chow Test*) atau *likelihood ratio test* adalah pengujian F statistics untuk memilih apakah model yang digunakan *Common Effect* atau *Fixed Effect* (Winarno, 2011). Uji Chow dalam penelitian ini menggunakan *Eviews*. Hipotesis yang dibentuk dalam Uji Chow adalah sebagai berikut:

H_0 : Model Common Effect

H_a : Model Fixed Effect

Uji Hausman

Pengujian ini dilakukan untuk menguji metode yang paling baik digunakan, apakah fixed effect atau random effect. Statistik Uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan degree of Freedom sebanyak k (jumlah variabel bebas). Jika nilai statistik Husman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model Fixed Effect, sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah Random Effect. Oleh karena itu, pengujian ini dilakukan dengan mengajukan beberapa hipotesa sebagai berikut:

H_0 : random effect model

H_a : fixed effect model

Kriteria penilaian atas pengujian ini dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% adalah:

Jika nilai *p-value* $\geq 5\%$, maka H_0 diterima (model *random effect*)

Jika nilai *p-value* $< 5\%$, maka H_0 ditolak (modal *fixed effect*)

Uji Asumsi Klasik

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, maka untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang mendasari model regresi. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya masing-masing variabel yang berdistribusi (Ghozali, 2011). Dalam menguji normalitas dengan *Eviews 7* menggunakan cara histogram dan uji Jarque – Bera (JB) yaitu uji statistik untuk mengetahui apakah residual data berdistribusi normal (Winarno, 2011). Hipotesis yang akan diuji sebagai berikut:

H_0 : Nilai ui berdistribusi normal

H_a : Nilai ui tidak berdistribusi normal

Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linear antar variabel independen, karena melibatkan beberapa variabel independen (Winarno, 2011). Jika nilai F hitung $>$ F kritis pada dan derajat kebebasan tertentu maka model mengandung unsur multikolinieritas. Pada pengujian ini F kritis pada yang ditetapkan adalah sebesar 0.85.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya bernilai tetap, maka hasil regresi persamaan tersebut disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan Uji Park dengan melihat probabilitas koefisien masing-masing variabel independen. Hipotesis yang akan diuji yaitu:

H_0 : tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model

H_a : terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model

Kriteria pengujian yang dilakukan yaitu:

H_0 diterima apabila nilai probabilitas signifikansi $>$ 0.05

H_a diterima apabila nilai probabilitas signifikansi $<$ 0.05

Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtun waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya (Winarno, 2011). Istilah autokorelasi bisa didefinisikan sebagai korelasi diantara anggota observasi yang menurut waktu (seperti data deret berkala) atau ruang (Gujarati, 2007).

Autokorelasi dapat diidentifikasi salah satunya dengan melakukan Uji Durbin-Watson. Hipotesis yang akan diuji yaitu:

H_0 : tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model

H_a : terdapat masalah autokorelasi di dalam model

Kriteria pengujian yang dilakukan yaitu:

H_0 diterima apabila D-W stat berada pada nilai $= 1.54 \geq DW \leq 2.46$

H_a diterima apabila D-W stat berada pada nilai $= 1.54 \leq DW \geq 2.46$

Uji Hipotesis

Uji Statistik t (*t test*)

Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas (independen) secara parsial (individual) dalam menerangkan variasi variabel terikat. Pengujian dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan nilai t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan.

Menentukan berapa nilai t hitung dengan menggunakan program *Eviews 7*, kemudian tingkat signifikansi ditentukan berdasarkan:

- 1) Bila t hitung $>$ t tabel atau probabilitas $<$ tingkat signifikansi (Sig $<$ 0,05), maka H_a diterima dan H_0 ditolak, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Bila t hitung $<$ t tabel atau probabilitas $>$ tingkat signifikansi (Sig $>$ 0,05), maka H_a ditolak dan H_0 diterima, variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Statistik F (*F test*)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Gujarti, 2007).

- Jika signifikansi $>$ 0,05 maka H_0 diterima,
- Jika signifikansi $<$ 0,05 maka H_a diterima.

4. ANALISIS dan PEMBAHASAN

4.1 Hasil Data Deskriptif

	RMC	KI	UD	UP
Mean	0.705263	1.973684	4.742105	17.04737
Median	1.000000	2.000000	4.000000	17.00000
Maximum	1.000000	5.000000	9.000000	21.00000
Minimum	0.000000	0.000000	2.000000	13.00000
Std. Dev.	0.457129	1.183816	1.880509	1.846738
Skewness	-0.900426	0.031702	0.725428	0.269017
Kurtosis	1.810768	2.440004	2.315307	2.167550
Jarque-Bera	36.87064	2.514457	20.37583	7.777752
Probability	0.000000	0.284441	0.000038	0.020468
Sum	134.0000	375.0000	901.0000	3239.000
Sum Sq. Dev.	39.49474	264.8684	668.3632	644.5737
Observations	190	190	190	190

Sumber : Hasil olahan data

Hasil dari data deskriptif menyajikan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang mempengaruhi keberadaan *Risk Management Committee (RMC)* sebagai variabel dependen. Nilai minimum pada data Jumlah Komisaris Independen (KI) ini adalah 0, yang berarti tidak terdapat sama sekali komisaris independen pada Bank tersebut dan angka 5 untuk nilai maksimum jumlah anggota komisaris independen dalam suatu Bank. Nilai rata-rata dalam data variabel jumlah anggota komisaris independen adalah sebesar 1.973684 dan nilai tengah dalam data variabel jumlah anggota komisaris independen adalah sebesar 2.

Ukuran Dewan (UD) didapat dari jumlah dewan komisaris yang terdapat dalam organisasi Bank. Dengan nilai maksimum dewan komisaris pada data adalah 9 orang dan minimum sebesar 2 orang. Rata-rata ukuran dewan adalah sebesar 4,7421 atau 5 orang, dengan standar deviasi sebesar 1,8805 dan nilai tengah dalam data variabel ukuran dewan adalah sebesar 4.

Ukuran Perusahaan (UP) diperoleh dengan menjumlahkan aktiva setiap Bank. Dalam penelitian ini agar nilai dari aktiva tidak terlalu besar perbedaannya maka nilai aktiva di LogaritmaNormal (LN). Nilai maksimum adalah sebesar 21 yang merupakan bank dengan aset terbesar di Indonesia. Nilai minimum dalam ukuran perusahaan adalah sebesar 13 dan nilai rata-rata bank adalah 17, 04737. Standar deviasi untuk ukuran perusahaan adalah sebesar 1, 846738 dan nilai tengah dalam data variabel ukuran perusahaan adalah sebesar 17.

4.2 Hasil Pengujian

Analisis Regresi Data Panel

Uji *Chow*

Hasil Uji Chow Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.378171	(37,149)	0.0000
Cross-section Chi-square	115.739216	37	0.0000

Sumber : Hasil olahan data

Berdasarkan tabel hasil Uji *Chow* menunjukkan nilai probabilitas *cross-section chi-square* adalah 0.0000. Nilai probabilitas ini lebih rendah dari kriteria pengujian yang memberikan batasan *chi-square* sebesar 0.05. Hal tersebut menyebabkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dengan itu, model fit dapat menggunakan *fixed effect model*.

Kemudian penelitian ini dilanjutkan dengan menggunakan model fixed effect yang selanjutnya dilakukan Uji *Hausman*.

Uji Hausman

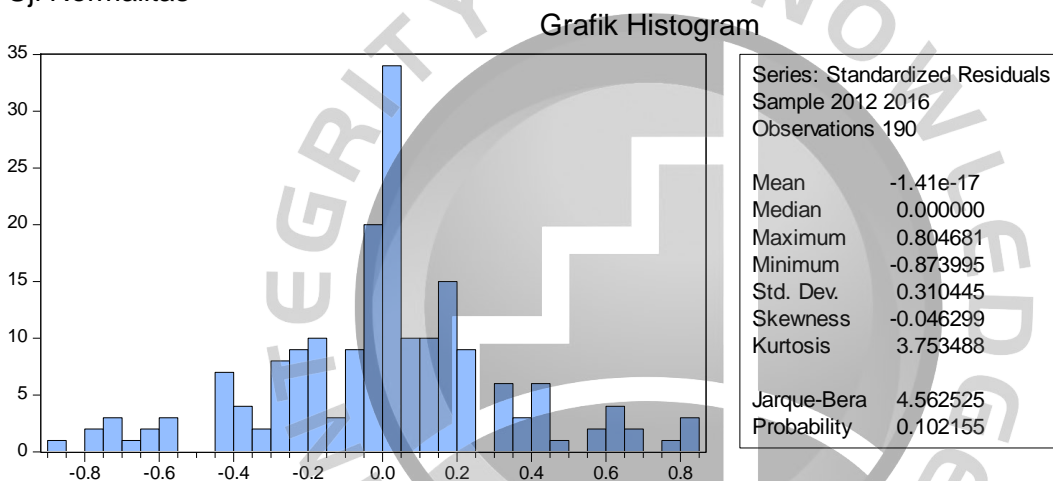
Hasil Uji *Hausman*
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.296049	3	0.1514

Sumber :Hasil olahan data

Tabel di atas menunjukkan nilai probabilitas cross-section random sebesar 0.1514. Nilai probabilitas berada di atas kriteria batasan *cross-section fixed* dalam penelitian ini, yaitu 0.05. Hal tersebut menyebabkan H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga model regresi data panel yang fit digunakan dalam penelitian ini adalah *random effect model*.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas



Sumber: hasil olahan data

Berdasarkan grafik histogram pada gambar di atas menunjukkan bahwa semua variable telah terdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas yang lebih besar dari 0.05 yaitu 0.102155. Dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa data penelitian telah terdistribusi normal, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak.

Uji Multikolinieritas

Hasil Uji Multikolinieritas

	KI	UD	UP
KI	1.000000	0.624390	0.448307
UD	0.624390	1.000000	0.699800
UP	0.448307	0.699800	1.000000

Sumber: Hasil Olahan Data

Syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah dengan melihat koefisien korelasi. Apabila koefisien antar variable kurang dari 0.85 maka dapat disimpulkan bahwa antar variable independen tidak ada unsur multikolinieritas. Berdasarkan tabel 4.5 korelasi antar variabel cukup rendah. Pengaruh antara variabel Komisaris Independen (KI) dengan variabel Ukuran Dewan (UD) sebesar 0.624390. Sedangkan pengaruh antara variabel Ukuran Dewan (UD) dengan variabel Ukuran Perusahaan (UP) sebesar 0.699800 yang merupakan koefisien tertinggi dari variabel lainnya. Selanjutnya, pengaruh antara variabel Ukuran Perusahaan (UP) dengan variabel Komisaris Independen (KI) sebesar 0.448307 yang merupakan koefisien terendah dari variabel lainnya.

Hasil yang di dapat dari correlation matrix di atas menunjukkan korelasi antar variable kurang dari 0.85, artinya tidak ada unsur multikolinieritas di dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Conclusion
KI	0.097297	0.033388	2.914103	0.0540	Non-Heteroskedastisitas
UD	0.019339	0.026301	0.735272	0.4631	Non-Heteroskedastisitas
UP	0.030636	0.023404	1.309008	0.1921	Non-Heteroskedastisitas
C	-0.100734	0.333328	-0.302206	0.7628	-

Sumber: Hasil Olahan Data

Hasil uji heteroskedastisitas di atas menunjukkan bahwa probabilitas koefisien variable Komisararis Independen (KI) sebesar $0.0540 > 0.05$, variable Ukuran Dewan (UD) sebesar $0.4631 > 0.05$ dan variable UP sebesar $0.1921 > 0.05$. seluruh variable independen menunjukkan nilai probabilitas koefisien yang lebih besar dari nilai signifikansi 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian, penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji *Durbin Watson* Hasil Persamaan Regresi

Durbin-Watson Statistic	
DW-stat	1.788424

Sumber: Hasil Olahan Data

Berdasarkan di atas, hasil uji autokorelasi menunjukkan *Durbin-Watson Stat* sebesar 1.788424. Maka dari hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini model regresi tidak mengalami masalah autokorelasi, sehingga dapat dilakukan pengujian hipotesis.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Hasil Regresi

Model Persamaan				
Heteroskedasticity Test : Park				
Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.	Conclusion
C	0.932074	1.408322	0.1611	
KI	0.161709	4.224925	0.0000	Signifikan
UD	-0.087086	-1.494975	0.1370	Tidak Signifikan
UP	-0.007802	-0.214195	0.8307	Tidak Signifikan
R-squared	0.538798			
Adjusted R-squared	0.414985			
F-statistic	4.351723			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil olahan data

Berdasarkan hasil regresi model penelitian di atas, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\text{RMC} = 0.932074 + 0.161709 \cdot \text{KI} - 0.087086 \cdot \text{UD} - 0.007802 \cdot \text{UP}$$

Persamaan linear berganda di atas dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Apabila variable Komisaris Independen (KI), Ukuran Dewan (UD) dan Ukuran Perusahaan (UP) diasumsikan konstan, maka *Risk Management Committee* (RMC) yang terjadi adalah 0.932074
- 2) Koefisien regresi untuk Komisaris Independen (KI) sebesar 0.161709. Hal ini menunjukkan bahwa *Risk Management Committee* (RMC) akan mengalami kenaikan sebesar 16,1709% untuk setiap kenaikan 1% *Risk Management Committee* (RMC) dan sebaliknya. Hal ini dengan asumsi variable lain adalah konstan.
- 3) Koefisien regresi untuk Ukuran Dewan (UD) sebesar -0.087086. Hal ini menunjukkan bahwa *Risk Management Committee* (RMC) akan mengalami penurunan sebesar 8,7086% untuk setiap kenaikan 1% *Risk Management Committee* (RMC) dan sebaliknya. Hal ini dengan asumsi variable lain adalah konstan.
- 4) Koefisien regresi untuk Ukuran Perusahaan (UP) sebesar -0.007802. Hal ini menunjukkan bahwa *Risk Management Committee* (RMC) akan mengalami penurunan sebesar 0,7802% untuk setiap kenaikan 1% *Risk Management Committee* (RMC) dan sebaliknya. Hal ini dengan asumsi variable lain adalah konstan.

Berdasarkan hasil koefisien regresi dari ketiga variable independen yang diuji pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Komisaris Independen (KI) memiliki koefisien regresi terbesar yaitu 0.161709, dengan kata lain bahwa Komisaris Independen merupakan variable dominan yang berpengaruh dalam penerapan *Risk Management Committee* (RMC) di Bank Umum Konvensional.

Pengujian Hipotesis

Uji Statistik t (*t test*)

Hipotesis 1:

Ho₁ : Variabel KI tidak signifikan mempengaruhi variabel RMC

Ha₁ : Variabel KI berpengaruh signifikan terhadap variabel RMC

Hasil berdasarkan table Hasil Regresi di atas, menunjukkan bahwa probabilitas variabel Komisaris Independen (KI) sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari 0.05 yang artinya menerima Ha₁ dan menolak Ho₁, sedangkan nilai koefisiennya sebesar 0.161709 yang berarti Komisaris Independen (KI) memiliki segi arah positif terhadap *Risk Management Committee* (RMC). Dinyatakan pula bahwa Ha₁ diterima, maka dapat disimpulkan bahwa Komisaris Independen (KI) mempengaruhi penerapan *Risk Management Committee* (RMC) di Bank Umum Konvensional.

Hipotesis 2:

Ho₂ : Variabel UD tidak signifikan mempengaruhi variabel RMC

Ha₂ : Variabel UD berpengaruh signifikan terhadap variabel RMC

Hasil berdasarkan table Hasil Regresi di atas, variabel Ukuran Dewan (UD) memiliki probabilitas sebesar 0.1370 atau lebih besar dari 0.05 yang artinya menerima Ho₂ dan menolak Ha₂, sedangkan nilai koefisiennya sebesar -0.087086 yang berarti Ukuran Dewan (UD) memiliki segi arah negatif terhadap *Risk Management Committee* (RMC). Dinyatakan pula bahwa Ha₂ ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa Ukuran Dewan (UD) tidak mempengaruhi penerapan *Risk Management Committee* (RMC).

Hipotesis 3:

Ho₃ : Variabel UP tidak signifikan mempengaruhi variabel RMC

Ha₃ : Variabel UP berpengaruh signifikan terhadap variabel RMC

Hasil berdasarkan table Hasil Regresi di atas, menunjukkan bahwa probabilitas variabel Ukuran Perusahaan (UP) sebesar 0.8307 atau lebih besar dari 0.05 yang artinya menerima Ho₃ dan menolak Ha₃, sedangkan nilai koefisiennya sebesar -0.007802 yang berarti Ukuran Perusahaan (UP) memiliki segi arah negatif terhadap *Risk Management Committee* (RMC). Dinyatakan pula bahwa Ho₃ diterima, maka dapat disimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan (UP) tidak mempengaruhi penerapan *Risk Management Committee* (RMC).

Uji Statistik F (*F test*)

Uji Statistik F digunakan untuk menguji apakah secara bersama-sama semua variable independen yaitu Komisaris Independen (KI), Ukuran Dewan (UD) dan Ukuran Perusahaan (UP) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen yaitu *Risk Management Committee* (RMC). Untuk pengujian ini, apabila nilai probabilitasnya berada di bawah 0.05, maka dapat disimpulkan

bahwa secara bersama-sama atau stimultan variable independen mempengaruhi variable dependen secara signifikan.

Berdasarkan hasil table Hasil Regresi di atas, uji *F test* di atas, nilai Prob(F-statistic) adalah sebesar 0.000000, dengan nilai signifikansi sebesar 0.05, maka nilai Prob(F-statistic) lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa secara stimultan atau bersama-sama, variable Komisaris Independen (KI), Ukuran Dewan (UD) dan Ukuran Perusahaan (UP) mempengaruhi penerapan *Risk Management Committee* (RMC) secara signifikan, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini terbukti mempengaruhi variabel dependen.

4.3 Implikasi Manajerial

Keberadaan *Risk Management Committee* dapat membantu direksi utama dalam hal memberikan rekomendasi atas kebijakan risiko, strategi dan aplikasi. Pembentukan dari komite tersebut diharapkan dapat membantu Bank Indonesia untuk mengawasi perbankan di Indonesia melalui pelaporan yang terkait dengan manajemen risiko.

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor seperti Ukuran Dewan dan Ukuran Perusahaan tidak memiliki hubungan dengan penerapan *Risk Management Committee*. Faktor jumlah anggota Komisaris Independen memiliki hubungan yang signifikan dengan penerapan *Risk Management Committee*, Hal ini menunjukkan bahwa dengan jumlah anggota Komisaris Independen yang sesuai, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan dan pengawasan terhadap risiko-risiko dalam bank.

Bank dengan jumlah anggota Komisaris Independen yang rendah atau belum memiliki Komisaris Independen diharapkan segera menambah atau memiliki Komisaris Independen sebagai bentuk kepatuhan terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan juga pengawasan yang lebih ketat terhadap risiko Bank. Penerapan *Risk Management Committee* yang baik dan sesuai dengan *good corporate governance* akan meningkatkan transparansi bank dan manajemen risiko bank.

KESIMPULAN dan SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji model analisis regresi data panel pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa :

- 1) Komisaris Independen memiliki pengaruh signifikan positif dengan penerapan *Risk Management Committee* pada perbankan di Indonesia, karena bagi Bank yang memiliki jumlah anggota komisaris independen atau tidak memiliki komisaris independen, hasil dari penerapan *Risk Management Committee* tidak terlalu baik terhadap pencapaian *Good Corporate Governance*.
- 2) Ukuran Dewan memiliki pengaruh signifikan negatif dengan penerapan *Risk Management Committee*, hal ini menunjukkan bahwa besar dan kecilnya ukuran dewan tidaklah mempengaruhi pemebentukan *Risk Management Committee*.
- 3) Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penerapan *Risk Management Committee*. Bank dengan asset kecil maupun besar memperhatikan Komite Manajemen Risiko untuk diterapkan pada Bank tersebut.

Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas, maka saran untuk penelitian mendatang adalah:

- 1) Komisaris Independen dan Ukuran Dewan yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keberadaan *Risk Management Committee* dapat diganti dengan variable lain yang lebih khusus.
- 2) Diharapkan dapat menambah variabel yang lebih luas sehingga akan meningkatkan hasil penelitian.
- 3) Diharapkan dapat menambah sampel yang lebih besar sehingga akan meningkatkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Robert N. & Govindarajan, Vijay. 2009. "Sistem Pengendalian Manajemen (Drs. F.X. Kurniawan Tjakrawala, Penerjemah.)". Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Bank Indonesia, 2010 Peraturan Bank Indonesia No.12/7/PBI/2010 tentang "Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus Dan Pejabat Bank Umum". Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (Edisi ke-5) .Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarti, D.N. 2007. "Dasar-dasar Ekonometrika (3rd ed.)". Jakarta. Erlangga.
- Gup, Benton E. & Kolari, James W. 2011. *Commercial Banking : The Management of Risk (11th Ed.)*. Prentice Hall.
- Idroes, Ferry N. 2008. *MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, 2008.
- Kallamu, Basiru Salisu. 2015. Risk Management Committee Atributes and firm performance. Jurnal. University Putra Malaysia.
- Keown, Arthur J., Martin, John D.,Titman,Sheridan. 2011. *Financial Management : Principles and Applications (11th Ed.)*. Pearson Prentice Hall.
- Liew et al. 2012. "Board of Directors and Voluntary Formation of Risk Management Committee : Malaysia Evidence".
- Otoritas Jasa Keuangan, 2016 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang "Penerapan Manajemen Risiko Untuk Bank Umum". Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2016 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 mengenai "Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum". Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2016 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 mengenai "Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum". Jakarta.
- Puspaningrum, Mona Ajeng dan Sugeng Pamudji. 2012. "Determinan Keberadaan Risk Management Committee Pada Perusahaan Go Public di Indonesia".Jurnal. Universitas Diponegoro.
- Sounders, Anthony & Cornett, Marcial M. (2011). *Financial Institutions Management : A Risk Management Approach (7th Ed.)*. McGraw/Hill International Edition.
- Winarno, W.W. 2011. "Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews".Yogyakarta; STIM YKPN.